

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat.*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi. 2010. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Total Media: Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers: Depok.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika: Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang – Undangan Dasar – Dasar dan Pembentukannya*. Kanikus: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Perundang – Undangan (1) Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Pataniari Sihan. 2012. *Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945*. Konpres: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Philipus M.Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada Universit Press: Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_. 1994. *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-En Rechtmatig Bestuur)*. Yuridika: Surabaya.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Samidjo. 1997. *Ilmu Negara*. CV. ARMICO: Bandung.
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.
- Sonny A. Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Kompas: Jakarta.
- Sukarno Aburaera. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*. Kencana: Jakarta.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Tatiek Sri Djatmiati. 2004. *Principle of Industrial Business License*. Airlangga University: Surabaya.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Yuliandri. 2010. *Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Yang Baik*. PT. Raja Grasindo: Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

## **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **JURNAL, MAKALAH, SKRIPSI/THESIS**

Agustian, Sanggup Leonard, 2019, "*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara*", Jurnal Hukum Magnum Opus, Surabaya, Vol. 2, No. 2, 2019.

Akib, Muhammad, 2012, "*Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*", Jurnal Media Hukum, Vol. 19, No. 2, 2012.

Basah, Sjachran, 1995, "*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*", Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Dewi, Dahlia Kusuma, 2014, "*Izin Lingkungan Dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Jurnal Hukum Usu, Vol. II, No. 1, 2014.

Hadjon, Philipus M, 1997, "*Tentang Wewenang*", Jurnal Yuridika, Surabaya, Vol. 7, No. 5-6, 1997.

Hidayat, Fia Nurul Fahida, "*Peranan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui*

*Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Banjar Patroma*’,  
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 1

Marzuki, H.M. Laica, 2007, “*Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*”, Jurnal Konstitusi”, Vol. 4, No. 1, 2007.

Rokhim, Abdul, “*Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36.

Saija, Vica J.E., 2014, “*Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*”, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 1, 2014.

Setiawan, I Kadek, 2017, “*Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro*”, Jurnal Legasi Indonesia, Denpasar, Vol. 14, No. 03, 2017.

Urmilasari, Evy, 2013, “*Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Bandung, Vol. 6, No. 1, Bandung, 2013.

## **WEBSITE**

M.Arief Sikandar, 2018, “*Pemda wajib delegasikan kewenangan perizinan ke OSS*”, <https://www.antaranews.com/berita/728585/pemda-wajib-delegasikan-kewenangan-perizinan-ke-oss>

Gusroniarben.wordpress.com

<https://kemlu.go.id/toronto/id/news/7759/lembaga-oss-badan-koordinasi-penanaman-modal-bkpm>

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Rennioza, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan DPMPTSP Kota Padang.

Wawancara dengan Fuad Syukri, Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang